



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pandangan Presiden Atas RUU tentang Perubahan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Disampaikan pada
Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI

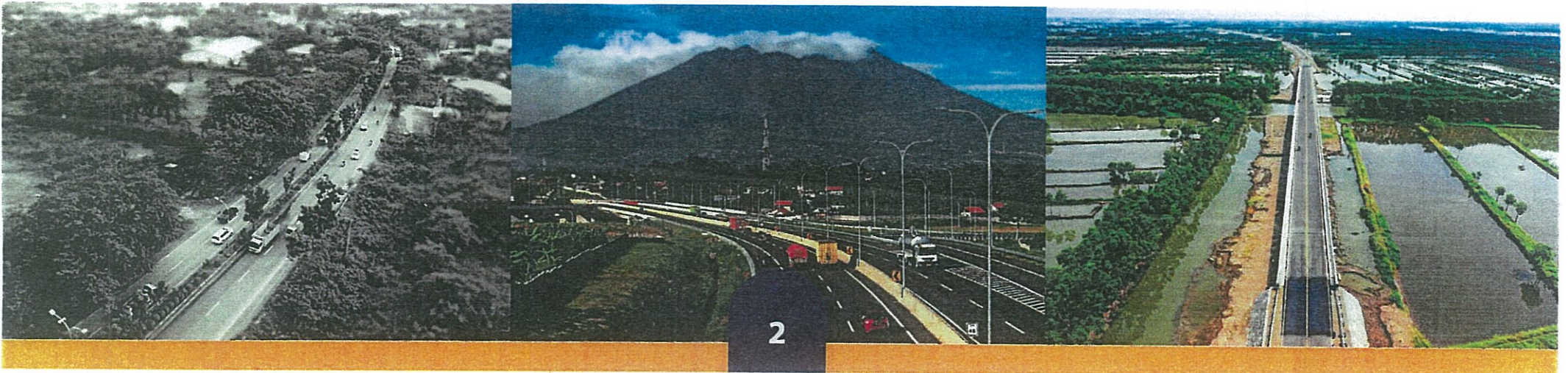


Jakarta, 24 Mei 2021



JALAN

sebagai prasarana transportasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mendukung ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, pemerataan pembangunan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI.





RUU mempertegas dan memperkuat:



- **Sistem, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan jaringan jalan**
- **Penyelenggaraan jalan daerah**
- **Pengadaan tanah**
- **Sistem dan data informasi**
- **Partisipasi**
- **Penyidikan dan ketentuan pidana**



RUU bertujuan a.l. mewujudkan:

Penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan



Pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing

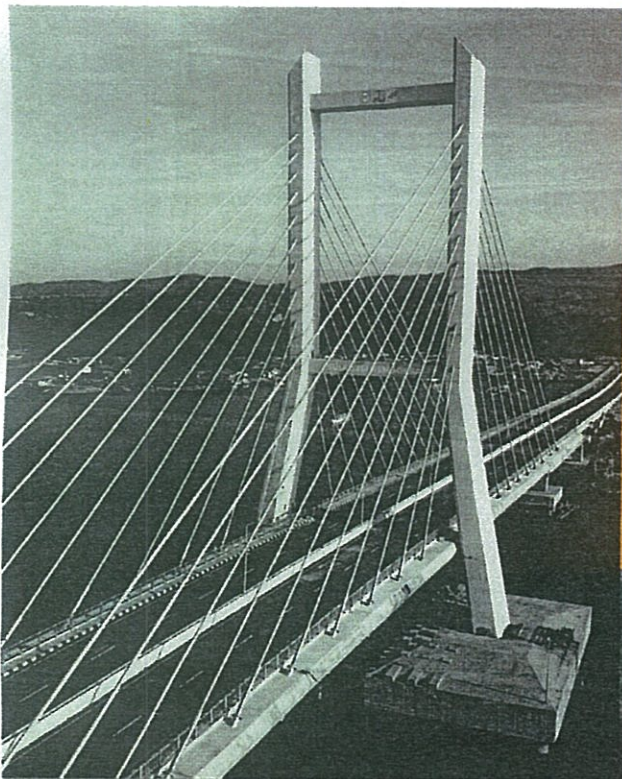


RUU mengakomodasi kebutuhan perubahan pengaturan dan dinamika yang berkembang



1

Pengelolaan aset jalan dalam rangka menuju penyelenggaraan jalan yang *good governance*



6





2

**Pengelolaan
infrastruktur Jalan
Tol yang transparan,
kompetitif, inovatif,
dan modern**

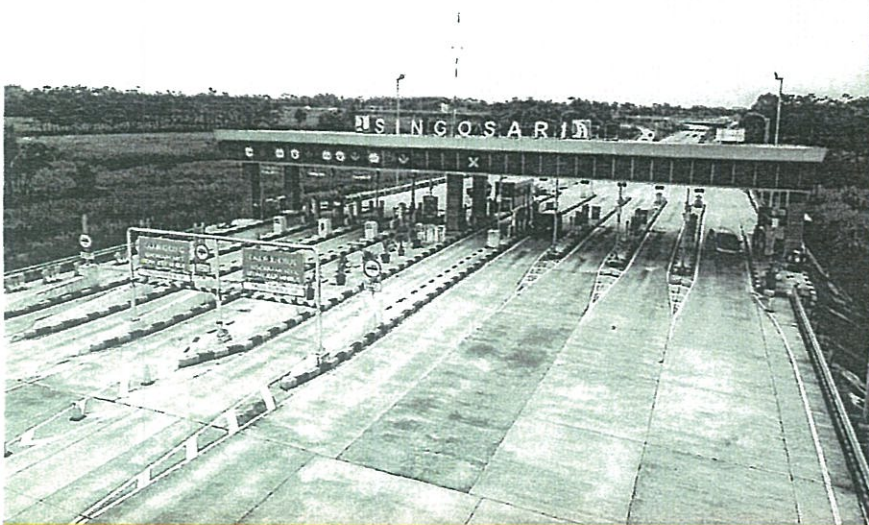
7





3

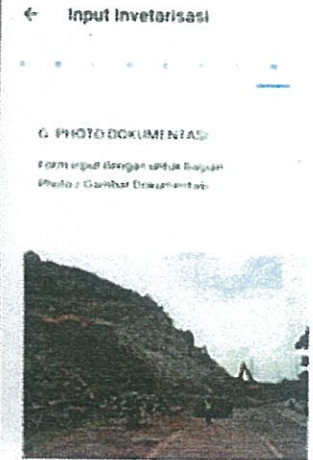
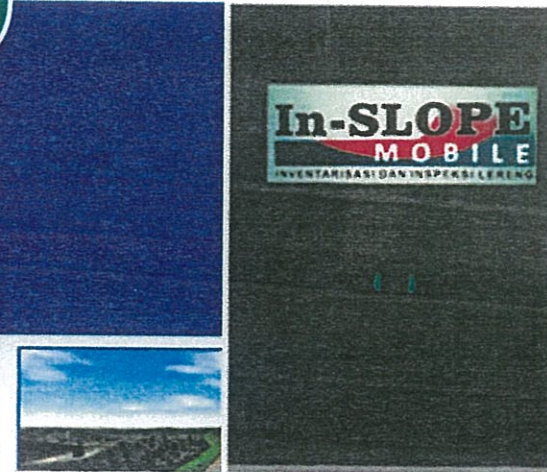
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal





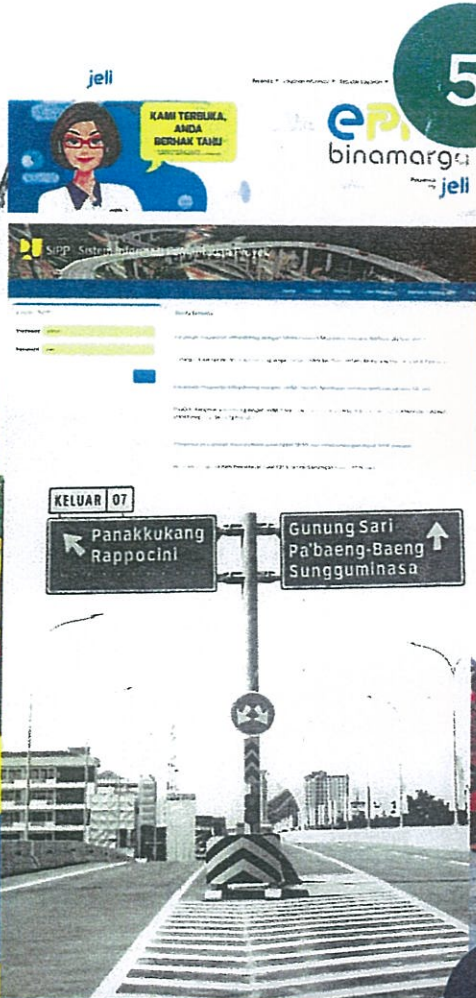
4

Pengelolaan data dan informasi sebagai bagian integral penyelenggaraan jalan



9





5

Perkuatan pengawasan dalam penyelenggaraan jalan



10



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**TERIMA
KASIH**